



UMKM Jangan Takut Didata, Pajak Bukan Penghambat

YOGYA (KR) - Bagi sebagian pelaku UMKM, didata pemerintah masih bisa memunculkan kekawatiran. Ada anggapan pendataan akan otomatis berujung pada kewajiban pajak. Padahal, legalitas dan pemahaman perpajakan justru dapat berbagai menjadi bekal penting agar usaha berkembang. Pesan inilah yang mengemuka dalam Business Development Services (BDS) 2026 yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta bersama Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Perinkop UKM) Kota Yogyakarta di Ruang Bima, Balaikota Yogyakarta, belum lama ini. Mengusung tema iUMKM Go Digital: Pemasaran Tepat, Bisnis Melesati, kegiatan tersebut diikuti 50 pelaku UMKM dari wilayah Kota Yogyakarta. Forum ini tidak hanya membekali pelaku usaha dengan strategi pemasaran digi-

tal, tetapi juga mempertemukan mereka dengan pemerintah daerah dan otoritas pajak untuk memahami legalitas usaha serta kewajiban perpajakan secara lebih utuh.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono yang mewakili Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Sebagian besar pelakunya merupakan perempuan yang menjalankan usaha dari rumah dengan modal kurang dari Rp25 juta. Namun, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki NPWP maupun legalitas usaha memadai sehingga dapat membatasi akses terhadap pembiayaan dan peluang pengembangan bisnis.

"Kegiatan seperti ini penting sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap wajib

pajak UMKM. Bukan sekedar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, melainkan juga membantu pelaku usaha untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik," demikian pesan Wawan dalam sambutan tertulisnya. Pemahaman perpajakan juga dinilai membantu pelaku usaha menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sanksi atau denda sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib.

Kepala KPP Pratama Yogyakarta Ba'i Nurhidayat menegaskan, pajak tidak semestinya dipandang sebagai penghambat UMKM untuk naik kelas. Legalitas dan pemahaman perpajakan perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan usaha. "Kami tidak ingin pajak menjadi penghambat. Pajak adalah teman bagi pelaku usaha untuk tumbuh bersama," ujarnya. **(Ira)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005